



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DAN PDRB DAERAH TERTINGGAL

Mochamad Gatot Awaludin¹⁾; Puji Wibowo^{2)*}

¹⁾ 1401190134_mochamad@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ puji.wibowo@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

Underdeveloped areas are the government's main focus in the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Based on data from the Central Statistics Agency for 2015-2019 regarding poverty in underdeveloped areas, the figure shows a decline but has not yet reached the target set by the government in the 2015-2019 RPJMN, while there has been an increase in GRDP (Gross Regional Domestic Product) in underdeveloped areas from year to year. Fiscal decentralization is one of the efforts made by the government to alleviate disadvantaged areas. This research aims to empirically test and prove the influence of Original Regional Income (PAD), Special Physical Allocation Funds (DAK Physical) and Village Funds on poverty and GRDP in underdeveloped regions during the 2015-2019 period. The test results show that simultaneously PAD, Physical DAK and Village Funds have a significant influence on poverty and GRDP. PAD has a significant positive influence on GRDP but does not influence poverty. Physical DAK does not affect poverty and GRDP. Village Funds have a significant negative effect on poverty and a significant positive effect on GRDP.

Keywords: *Fiscal decentralization, Poverty, Regional GDP*

Abstrak

Daerah tertinggal menjadi fokus utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015-2019 mengenai kemiskinan daerah tertinggal menunjukkan angka yang menurun namun belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, sedangkan terjadi peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada daerah tertinggal dari tahun ke tahun. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa terhadap kemiskinan dan PDRB daerah tertinggal selama periode 2015-2019. Hasil pengujian menunjukkan secara simultan PAD, DAK Fisik dan Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan PDRB. PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap PDRB namun tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. DAK Fisik tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dan PDRB. Dana Desa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan dan signifikan positif terhadap PDRB.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Kemiskinan, PDRB

PENDAHULUAN

Berlakunya desentralisasi fiskal di Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan secara penuh kepada daerah otonom dalam menyelenggarakan tata kelola urusan pemerintahan yang berada diluar urusan pemerintah pusat. Sidik (2002) menyatakan apabila pemerintah daerah menjalankan tugas dan fungsi secara efektif, dan diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan terkait pelayanan publik, maka perlu dukungan sumber daya keuangan yang cukup, baik dari pajak daerah, retribusi daerah dan termasuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Abimanyu & Megantara (2009) menyatakan dengan besaran dana transfer yang semakin meningkat jumlahnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pendapatan per kapita di daerah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan sebaliknya rendahnya pendapatan per kapita akan meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah. Temuan ini sejalan dengan Paat et al. (2015) dalam penelitiannya menyatakan PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan. Adanya



desentralisasi fiskal mampu memberikan dorongan kepada daerah untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga tercapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat (Woyanti, 2013).

Salah satu isu utama dalam pembangunan nasional adalah masih adanya kesenjangan yang tinggi dalam hal pembangunan antar daerah di Indonesia, khususnya kesenjangan yang terjadi antara wilayah Indonesia di bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur. Kondisi ini didukung dengan fakta bahwa peta sebaran daerah tertinggal yang mayoritas berada di wilayah timur Indonesia dengan jumlah kabupaten mencapai 103 (84.42%) dari total 122 kabupaten daerah tertinggal (Bappenas 2016).

Pengertian daerah tertinggal adalah daerah yang memiliki wilayah dan masyarakat yang kemajuan perkembangan pembangunan dibawah rata-rata perkembangan daerah dalam skala nasional. Penetapan suatu daerah tergolong daerah tertinggal berdasarkan pada beberapa aspek dan kriteria antara lain: perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah (Perpres 131 Tahun 2015). Bappenas (2016) membagi dua kriteria untuk indikator perekonomian masyarakat, yaitu: kemiskinan yakni jumlah penduduk miskin dibagi total jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto. Penetapan daerah tertinggal berlaku selama lima tahun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Periode 2015-2019.

Agenda nawacita ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam rangka pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2019 adalah peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal sebesar 7,24 persen, rata-rata penurunan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14 persen, dan jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan sejumlah 80 dari 122 kabupaten daerah tertinggal (RPJMN 2015-2019).

Tabel 1. Potret Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal

Indikator Ekonomi	2015	2016	2017	2018	2019
Kemiskinan	21,68%	21,40%	20,96%	20,49%	20,10%
Pertumbuhan Ekonomi	6,53%	5,41%	5,26%	4,99%	5,11%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Pada Tabel 1 dapat diamati bahwa selama periode 2015-2019 data kemiskinan mengalami penurunan, namun pada akhir tahun 2019 jumlah penduduk miskin masih berada di angka 20,10%. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya gap antara target yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap realisasi yang terjadi di lapangan. Pemerintah optimis menargetkan jumlah penduduk miskin di akhir 2019 berada pada angka 14% (RPJMN 2015-2019). Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka rata-rata dari tahun ke tahun sekitar 5%, dengan data pada tahun 2019 menunjukkan angka 5,11%. Hasil ini masih belum mampu memenuhi target yang diberikan oleh pemerintah yaitu sebesar 7,24% pada tahun 2019 (RPJMN 2015-2019).

Lima tahun berlalu sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 dan saat ini telah terbit Peraturan Presiden 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 s.d. 2024. Pemerintah menetapkan sebanyak 62 kabupaten masih tergolong daerah tertinggal. Pengentasan daerah tertinggal masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu sebesar 80 daerah terentaskan yang berarti menyisakan 42 daerah tertinggal. Target pada tahun 2024 dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan 32 daerah beralih status dari daerah tertinggal, sehingga menyisakan 30 daerah tertinggal pada tahun 2024.

Beberapa studi telah dilakukan untuk melihat determinan kemiskinan ditinjau dari perspektif keuangan daerah. Sulaeman & Silvia (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa



PAD, DAU, DBH dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan ekonomi daerah, sedangkan DAK tidak memberikan dampak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam mengelola PAD dan dana perimbangan yang diterima dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian daerah. Hal serupa ditemukan oleh Maryati & Endrawati (2012) dan Setyawati et al. (2007) ketika mengamati dampak kebijakan APBD pada sejumlah daerah.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus justru berpengaruh negatif pada perekonomian daerah pada beberapa daerah di provinsi Bali. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan APBD belum sepenuhnya dapat menjadi stimulator perekonomian dan pengentasan kemiskinan. Kinerja ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh dana transfer yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana desa.

Penelitian yang dilakukan Otheliansyah & Yasni (2021) menemukan bahwa dana desa memberikan efek negatif terhadap tingkat kemiskinan. Senada dengan hal tersebut, Arham & Ratu (2020) menyatakan bahwa dana desa bersamaan dengan dana alokasi khusus secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Riset ini didukung oleh Mukiwihando (2020) yang menemukan bahwa DAK Pertanian memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. Hasil senada juga ditemukan oleh Sigit & Kosasih (2019) dan Tangkumahat et al. (2017) yang menemukan bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Di sisi lain, studi mengenai dampak pengelolaan keuangan pemerintah dapat kita jumpai pula di manca negara. Rosoiu (2015) menganalisis bagaimana dampak dari pendapatan dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Rumania selama periode 1998-2014. Hasil riset menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dan belanja pemerintah. Lin & Liu (2000) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian mengenai kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah dan dampaknya terhadap indikator kesejahteraan masyarakat telah dijelaskan pada sejumlah literatur di atas. Namun demikian, belum ada riset yang membahas mengenai determinan upaya pengentasan kemiskinan pada daerah tertinggal. Penelitian dengan objek daerah tertinggal penting untuk dilakukan karena dalam riset ini akan membandingkan upaya pengentasan kemiskinan dari perspektif pengelolaan keuangan daerah pada daerah dengan strata ekonomi yang sama. Hal ini berbeda dengan riset-riset lainnya yang tidak melakukan pengelompokan daerah sesuai dengan kondisi dan level ekonominya. Disamping itu, penelitian sebelumnya hanya membahas pengaruh aspek keuangan APBD terhadap tingkat kemiskinan tanpa memperhitungkan pengaruh dana desa. Studi ini menyertakan dana desa sebagai variabel penting yang layak dipertimbangkan dalam program pengentasan kemiskinan karena dana tersebut langsung diterima oleh pemerintah desa, dimana sumber kemiskinan biasanya berasal dari daerah tersebut.

Berdasarkan gambaran umum yang diuraikan, serta beberapa penelitian terdahulu, perlu dilakukan penelitian dengan objek daerah tertinggal dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pengentasan daerah tertinggal. Terlihat adanya gap antara target dan realisasi untuk kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal pada tahun 2019 sehingga perlu adanya penelitian yang melihat peranan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung pengentasan daerah tertinggal. Peneliti merujuk kepada indikator perekonomian yaitu kemiskinan dan PDRB (Bappenas, 2016) sebagai bagian dari indikator penetapan daerah tertinggal dalam menentukan variabel terikat yang diteliti, sehingga



penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus fisik, dan dana desa terhadap kemiskinan dan PDRB daerah tertinggal.

KAJIAN PUSTAKA

Teori *Fiscal Federalism*

Oates (1972) menyatakan bahwa fiscal federalism adalah sektor publik dengan tingkat pengambilan keputusan yang tersentralisasi dan terdesentralisasi di mana pilihan dibuat di setiap tingkat tentang penyediaan layanan publik yang sangat ditentukan oleh permintaan penduduk untuk memenuhi layanan tersebut. Desentralisasi fiskal menurut Martinez-Vazquez et al (2017) berkaitan dengan bagaimana sektor publik diatur dan bagaimana menciptakan peluang pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Tata kelola yang terdesentralisasi dapat memulihkan kepercayaan dalam kebijakan publik dan memberikan dasar untuk konsensus kebijakan yang lebih luas.

Pada teori fiscal federalism yang lebih tradisional (Hayek, 1945) ditekankan adanya keuntungan alokasi sumber daya atas dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal pada prinsipnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Oates, 1993). Hal ini diperkuat teori bahwa pendeklasian fiskal kepada pemerintah yang berada di level bawah lebih memiliki kedekatan dengan masyarakat dan keunggulan informasi jika dibandingkan dengan perumusan kebijakan secara sentralisasi, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di wilayahnya (Wibowo, 2008).

Selanjutnya, Pepinsky & Wihardja (2011) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memperkuat kebijakan regional yang inovatif untuk menanggapi permintaan pasar sehingga menarik investasi. Pentingnya bantuan pendanaan belanja modal disebabkan oleh adanya perbedaan kapasitas fiskal yang spesifik pada setiap daerah. Variasi dalam kapasitas fiskal menyebabkan mobilisasi produksi atas tenaga kerja dan modal. Hal ini mengarah pada pemerataan dana transfer yang tidak efisien (Aritenang, 2019). Oleh karena itu, dana transfer dari pemerintah pusat yang spesifik untuk belanja modal akan sangat penting untuk menetapkan keseragaman standar minimum atas infrastruktur publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan raya lintas wilayah. Selain itu, peran pemerintah pusat sangat penting, karena dukungan keuangan dari pemerintah pusat dalam hal investasi infrastruktur daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar (Zheng et al., 2015).

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan melakukan belanja daerah untuk prioritas dan kebutuhan daerah dengan prinsip bahwa anggaran yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan publik dan menjadi penggerak roda perekonomian di daerah. Manajemen penerimaan dan pemerintah menjadi prioritas dalam tercapainya masyarakat yang sejahtera dan mengurangi angka kemiskinan.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut teori Keynes, konsep pendapatan nasional berupa permintaan agregat meliputi konsumsi rumah tangga masyarakat (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) serta kegiatan ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dirumuskan dalam persamaan $Y = C + I + G + (X-M)$. Berdasarkan teori ini, campur tangan pemerintah berupa pengeluaran (G) menjadi variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional (Duamiry, 2006). Rostow-Musgrave (Aladejare, 2013) menyatakan belanja pemerintah memiliki nilai yang besar ketika memulai pelaksanaan pembangunan. Ketika melaksanakan pembangunan, yang pertama kali disiapkan adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadikan biaya awal pembangunan akan memiliki nilai yang besar.

Menurut Hukum Wagner (Wagner's Law) (1978) (Dluhosch & Zimmermann, 2006) peran dan belanja pemerintah (government expenditure) akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Solikin, 2018). Ketika suatu



wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal ini meningkatkan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik sehingga peran pemerintah dalam hal penyediaan layanan akan semakin besar (Aladejare, 2013). Dari pola ini, maka belanja pemerintah pusat melalui transfer keuangan dan dana desa terus menerus meningkat dari tahun ke tahun.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan rumit karena melibatkan multi dimensi konsep (Yao, 2007:13). Salah satu gagasan klasik terkait teori kemiskinan adalah yang dikemukakan oleh Nurkse (1952) bahwa negara miskin karena pada dasarnya memang miskin. Srinivas (2015) menjelaskan dalam causes of poverty theory atau teori penyebab kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu individu dan agregat.

Secara individu, faktor penentu kemiskinan dapat berasal dari faktor pendidikan, keterampilan, pengalaman, kecerdasan, kesehatan, cacat, usia, orientasi kerja, budaya kemiskinan, diskriminasi (gender, ras atau agama) dan jenis kelamin. Adapun secara aggregat, faktor penentu kemiskinan bisa berasal dari faktor-faktor ekonomi yang lebih luas, seperti ketersediaan kesempatan kerja layak yang terbatas, kegagalan pasar (penawaran dan permintaan tidak seimbang) dan pendapatan nasional yang rendah (Zamhari et al, 2018). Senada dengan hal tersebut, Piachaud (2002) mengemukakan bahwa modal menjadi faktor penentu bagi kemiskinan dan social exclusion atau keterkucilan sosial.

Bank Dunia melaporkan bahwa terdapat dua istilah dalam kemiskinan, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Situmorang 2014, 15 dan Wahyudi 2011, 12). Kemiskinan absolut pada hakikatnya mengacu kepada kondisi ekonomi dan/atau sosial seseorang atau rumah tangga lebih tinggi atau lebih rendah daripada kondisi standar atau minimal untuk hidup layak. Stadar bagi negara berkembang seperti Indonesia US \$1 per kapita per hari sebagai batas minimum untuk dapat hidup layak. Jadi jika pendapatan per kapita dibawah US \$1 per hari, maka menurut Bank Dunia seseorang tersebut disebut miskin. Adapun konsep tentang kemiskinan dari Bappenas adalah melihat kemiskinan dari kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Maulana & Masbar, 2018).

Putrayuda et al (2017) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk memutus lingkaran setan kemiskinan adalah melalui intervensi pemerintah dalam bentuk investasi melalui belanja modal. Todaro & Smith (2008) menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi tingkat pendapatan nasional rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya lambat hal ini disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk mendorong pengentasan kemiskinan melalui belanja modalnya

Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya menjadi dasar acuan serta memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dalam melakukan penelitian, perlu ada rujukan atas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian. Studi mengenai pengaruh PAD, DAK Fisik dan Dana Desa di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan penekanan masing-masing penelitian.

Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan Otheliansyah & Yasni (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, setiap peningkatan realisasi dana desa akan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Dana desa berpengaruh positif terhadap PDRB perkapita, setiap peningkatan penyaluran dana desa akan meningkatkan PDRB perkapita di daerah dan terdapat hubungan timbal balik antara tingkat kemiskinan dan PDRB perkapita. Peningkatan PDRB perkapita akan diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan begitu pula sebaliknya.



Arham & Ratu (2020) dalam penelitiannya menguji dampak dari transfer fiskal khususnya dana desa pada pendapatan di pedesaan dan tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan menemukan beberapa hasil kesimpulan, pertama fluktuasi muncul selama implementasi dana desa dengan elastisitas perubahan dari distribusi pendapatan masyarakat pedesaan relatif kecil, meskipun penurunan pendapatan sebelum kebijakan dana desa dilaksanakan. Kedua, adanya penurunan yang stabil dari tingkat kemiskinan pedesaan, menariknya penurunan ini melambat ketika kebijakan dana desa dijalankan. Hal ini disebabkan 83,9% dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik, yang hasilnya baru dapat dilihat dalam jangka panjang. Ketiga, dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa transfer dana desa tidak signifikan dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, dengan pertimbangan bahwa penggunaan dana desa memiliki kecenderungan untuk aparat desa maupun orang dekat dengan kepala desa. Keempat, dana desa bersamaan dengan dana alokasi khusus secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Peningkatan dari alokasi dana desa berdampak terhadap komunitas masyarakat pedesaan.

Mukiwhando (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa DAK Pertanian memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. Dengan menggunakan Common Effect Model memperoleh hasil bahwa dengan penambahan alokasi DAK Pertanian sebesar 1% mampu meningkatkan PDB Pertanian sebesar 0,99%. Hasil ini membuktikan bahwa alokasi DAK Pertanian memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PDB. Hal ini memperlihatkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam memberikan alokasi DAK Pertanian sudah tepat, namun perlu dilakukan penajaman dari aspek sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas petani, serta luas lahan pertanian yang perlu dikembangkan yang berdampak pada kesejahteraan petani.

Sigit & Kosasih (2019) dalam penelitiannya dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif tentang dana desa terhadap kemiskinan pada seluruh kabupaten kota di indonesia, menemukan bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Bukti ini menunjukkan bahwa kebijakan dana desa efektif dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan di daerah. Namun demikian masih perlu adanya perbaikan dari pelaksanaan kebijakan dana desa, antara lain penyempurnaan formulasi, pengawasan dan inovasi penggunaan dana desa.

Sulaeman & Silvia (2019) dalam penelitiannya menguji pengaruh PAD, DAU, DBH, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sampel seluruh kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa PAD, DAU, DBH dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAK tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam mengelola PAD dan dana perimbangan yang diterima dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Kebijakan dana perimbangan membantu daerah dalam melaksanakan pembangunan, namun DAK belum memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dikarenakan sifatnya yang tidak fleksibel. Penggunaan DAK sudah dialokasikan untuk belanja tertentu sesuai arahan dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2017) dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah delapan kabupaten dan satu kota provinsi di Bali periode 2011 s.d. 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tangkumahat et al. (2017) dalam penelitiannya menunjukkan Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang berada di Kecamatan



Pineleng, Kabupaten Minahasa. Dana desa dalam pemanfaatannya digunakan secara swakelola, dengan mempekerjakan masyarakat desa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan desa.

Rosoiu (2015) menganalisis bagaimana dampak dari pendapatan dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Rumania selama periode 1998-2014. Dengan menggunakan vector auto regressive models untuk menganalisis dampak dari kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Keinginan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dan belanja pemerintah.

Maryati & Endrawati (2012) dalam hasil analisisnya membuktikan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pengaruh yang diperoleh dari DAK disebabkan dari nilai realisasi DAK yang diterima pemerintah daerah penggunaannya untuk mendanai kegiatan khusus penugasan yang merupakan urusan daerah sehingga output yang dihasilkan telah ditetapkan misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain-lain.

Setiyawati (2007) dalam penelitiannya melihat pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan hasil temuannya menemukan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hasil pengujian secara tidak langsung PAD terhadap kemiskinan adalah sebesar 9,66% dan pengangguran sebesar 16,95%, sedangkan DAU terhadap kemiskinan adalah sebesar 4,9% dan terhadap pengangguran sebesar 8,6%. DAK dan belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini hal ini dikarenakan karakteristik DAK yang peruntukannya cukup spesifik.

Lin & Liu (2000) melakukan analisis terhadap desentralisasi fiskal yang dilakukan pada periode pertengahan 1980 di China terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita. Hasil temuan berupa desentralisasi fiskal memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini konsisten dengan hipotesis bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu reformasi pedesaan, akumulasi modal, dan perkembangan sektor non pemerintah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di China selama 20 tahun terakhir.

Pengembangan Hipotesis

Kapasitas fiskal daerah menentukan bagaimana kemampuan daerah dalam mendanai setiap pengeluaran yang dilakukan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan pelimpahan wewenang untuk memungut penerimaan yang digunakan untuk membiayai belanja pembangunan di daerah yang selaras dengan cita-cita dan tujuan pemerintah pusat sebagaimana teori fiscal federalism.

Abrar et al. (2020) melakukan penelitian terkait penetapan daerah otonomi khusus provinsi aceh. Menemukan bahwa PAD memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia melalui belanja barang dan jasa pemerintah. Namun setelah pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam temuannya, pemerintah daerah harus mampu melakukan harmonisasi peraturan yang mengatur tentang rencana pengembangan daerah, mengelola keuangan daerah dan evaluasi atas pembangunan yang sudah dilakukan. Dengan meningkatnya kemampuan



aparatur sipil di daerah serta peran aktif masyarakat, dapat mendorong peningkatan pembangunan daerah.

Daerah memiliki sumber penerimaan salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang diterima dari PAD akan dialokasikan ke belanja pemerintah daerah antara lain belanja pegawai, barang, bantuan sosial, modal dan lain sebagainya. Alokasi belanja bantuan sosial memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang masih berada dalam kategori miskin. Bentuk belanja bantuan sosial dapat berupa uang tunai maupun barang/jasa. Persentase antara PAD dengan total penerimaan daerah mempengaruhi dari total belanja yang akan dialokasikan, semakin tinggi persentase PAD terhadap penerimaan daerah maka pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam melakukan alokasi anggaran sehingga meningkatnya kualitas belanja program dan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

H1: PAD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan daerah tertinggal.

DAK Fisik merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan infrastruktur antar daerah yang sejalan dengan program prioritas nasional. Pada tahun 2017 DJPK menetapkan kebijakan umum pengalokasian dana perimbangan tahun 2017 yang salah satunya mengatur mengenai perbaikan pengelolaan DAK Fisik. Pengalokasian DAK Fisik dari semua berdasarkan prioritas national menjadi proposal based dan prioritas nasional. Dengan proposal based masing-masing daerah tertinggal mengajukan kebutuhan infrastruktur pembangunan dan berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi DAK Fisik yang telah diajukan (DJPK, 2016). Realisasi DAK Fisik memberikan output capaian yang mendukung untuk peningkatan sarana infrastruktur di daerah. Masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang dibutuhkan seperti jalan, irigasi dan jaringan. Paulus et al. (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah memiliki hubungan negatif. Kontribusi penurunan 1 persen kemiskinan dipengaruhi oleh variabel DAK senilai 0.2101 persen. Pemberian dana alokasi khusus fisik diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pemerataan infrastruktur antar daerah. Setelah diberikan dana alokasi khusus fisik, infrastruktur di daerah merata dan terserapnya tenaga kerja yang akhirnya berdampak pada pengurangan kemiskinan di daerah.

H2: DAK Fisik berpengaruh negatif terhadap kemiskinan daerah tertinggal.

Dana desa merupakan bagian dari alokasi APBN yang diberikan untuk desa, penyalurannya ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke APBD kabupaten/kota, kemudian di transfer kembali ke APB Desa (Kementerian Keuangan, 2017). Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat desa pelaku utama pembangunan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Sigit & Kosasih (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana desa terhadap kemiskinan : studi kasus tingkat kabupaten/kota di Indonesia. hasil penelitian menyimpulkan bahwa dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Bukti ini menunjukkan bahwa dana desa efektif dalam program pengentasan kemiskinan masyarakat di daerah. Peningkatan penyaluran dana desa

H3: Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan daerah tertinggal

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010). Derajat tersebut memperlihatkan bagaimana perbandingan PAD terhadap seluruh total penerimaan daerah. Semakin tinggi persentase PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Hal ini akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang nantinya berdampak pada kualitas output dan belanja pemerintah daerah. Nilai PAD yang tinggi memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam rangka pengalokasian belanja untuk mendukung peningkatan PDRB.



Sulaeman & Silvia (2019) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sejalan dengan Anwar et al. (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan analisis jalur melihat hubungan pendapatan asli daerah dengan PDRB. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan terhadap peningkatan PDRB. Peningkatan PDRB terjadi sebagai akibat dari alokasi anggaran pemerintah daerah. Memberikan pengaruh signifikan positif terhadap PDRB di kota manado. Sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah yaitu $Y = C + I + G + (x-m)$. Persentase government spending (G) akan sejalan dengan nilai dari Pendapatan Nasional (Y), ketika nilai G naik maka Y akan ikut naik.

H4: PAD berpengaruh positif terhadap PDRB daerah tertinggal

DAK Fisik merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan infrastruktur antar daerah yang sejalan dengan program prioritas nasional. Kebijakan pengelolaan DAK Fisik mengalami perubahan pada tahun 2016-2017, semula DAK Fisik merupakan program prioritas nasional menjadi *proposal based* yang diajukan oleh daerah penerima DAK Fisik dan mendukung prioritas nasional (DJPK, 2016). Realisasi DAK Fisik memberikan output capaian yang mendukung untuk peningkatan sarana infrastruktur di daerah. Masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang dibutuhkan seperti jalan, irigasi dan jaringan. Peningkatan akses layanan dasar yang diterima oleh masyarakat akan meningkatkan pergerakan perekonomian masyarakat. Adanya infrastruktur yang mendukung peningkatan PDRB seperti jalan raya diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat yang nantinya berdampak pada PDRB daerah tertinggal. Mukiwihando (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa DAK Pertanian memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. Pengujian dilakukan dengan Common Effect Model memperoleh hasil bahwa dengan penambahan alokasi DAK Pertanian sebesar 1% mampu meningkatkan PDB Pertanian sebesar 0,99%. Hasil ini membuktikan bahwa alokasi DAK Pertanian memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PDB.

H5: DAK Fisik berpengaruh positif terhadap PDRB daerah tertinggal

Dana desa merupakan bagian dari alokasi APBN yang diberikan untuk desa, penyalurannya ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke APBD kabupaten/kota, kemudian di transfer kembali ke APB Desa (Kementerian Keuangan, 2017). Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat desa pelaku utama pembangunan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Afrilianto (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan laju PDRB secara positif dan signifikan ialah Alokasi Dana Desa dan jumlah angkatan kerja. Fokus utama penggunaan dana desa adalah penyerapan tenaga kerja yang diwujudkan dengan terciptanya lapangan kerja baru. Pemberian dana kepada badan usaha milik desa digunakan sebagai program unggulan dalam pemanfaatan dana desa yang berdampak pada terserapnya tenaga kerja di desa. Dampaknya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada PDRB daerah tertinggal.

H6: Dana Desa berpengaruh positif terhadap PDRB daerah tertinggal

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam



meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber. Data jumlah penduduk miskin, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK), laju inflasi, nilai IPM dan jumlah penduduk untuk setiap kabupaten daerah tertinggal diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data realisasi PAD, DAU, DBH, dan DAK Fisik per kabupaten untuk tahun 2015-2019 diperoleh dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Sementara realisasi Dana Desa per kabupaten selama tahun 2015-2019 diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Adapun data realisasi belanja modal infrastruktur diperoleh dari Sistem Informasi Keuangan Daerah DJPK melalui nota dinas permintaan data dari PKN STAN kepada DJPK. Data yang digunakan dalam studi ini bersifat balanced panel karena tidak ada data yang hilang.

Objek pada penelitian ini adalah 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal menurut Perpres Nomor 131 Tahun 2015. Penetapan daerah tertinggal ini dilakukan setiap lima tahun sekali sehingga periode waktu yang digunakan dari tahun 2015 s.d. 2019. Tahun 2015 merupakan awal penetapan suatu daerah dinyatakan sebagai daerah tertinggal.

Selanjutnya, Sekaran & Bougie (2016) menyatakan bahwa sebagian dari populasi dinamakan sampel atau dengan kata lain sampel terdiri dari sejumlah anggota yang diambil dari populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode sampel jenuh yaitu dengan mengambil semua anggota populasi untuk dijadikan sampel. Sugiyono (2016) menjelaskan populasi merupakan ruang lingkup area yang menjadi objek generalisasi yang memenuhi karakter sesuai dengan ketentuan atau ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan digunakan untuk penentuan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam memilih sampel. Sampel yang dipilih adalah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai Perpres 131 tahun 2015.

Definisi Operasional Variabel

1) Variabel Terikat

a. Kemiskinan (TMT)

Kemiskinan (TMT) adalah jumlah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah angka garis kemiskinan, serta merupakan gabungan antara penduduk miskin perdesaan dan perkotaan. Sumber data utama untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data Susenas BPS pada modul konsumsi dan pengeluaran. Pengukuran jumlah penduduk pada penelitian ini merujuk kepada Sigit & Kosasih (2020) dan Otheliansyah & Yasni (2021). Data tingkat kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin dari 122 kabupaten daerah tertinggal per tahunnya dari periode 2015-2019.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada penelitian ini menggunakan data nilai PDRB ADHK untuk memberikan gambaran PDRB daerah tertinggal. Penelitian ini menggunakan nilai PDRB ADHK berdasarkan penelitian Sulaeman dan Silvia (2019). Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan diukur dalam satuan miliar rupiah

2) Variabel Bebas

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data PAD yang digunakan dalam penelitian ini merupakan realisasi PAD masing-masing daerah tertinggal yang terdapat pada Laporan Realisasi APBD dalam satuan miliar rupiah. Penggunaan nilai realisasi dalam pengukuran PAD merujuk kepada penelitian Paulus et al. (2017) dan Sulaeman & Silvia (2019).

b. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF)

DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan realisasi penyaluran DAK Fisik yang diterima oleh kabupaten daerah tertinggal yang dituangkan dalam Laporan Realisasi APBD dalam satuan Miliar rupiah. Penggunaan nilai realisasi DAK Fisik dalam APBD merujuk kepada penelitian Widianto et al. (2016) dan Sulaeman & Silvia (2019).

c. Dana Desa (DD)

Dana desa merupakan bagian dari Transfer Keuangan dan Dana Desa dalam APBN. Dalam penelitian ini mengambil realisasi anggaran Dana Desa yang disalurkan kepada 122 kabupaten daerah tertinggal selama periode 2015-2019. Penggunaan nilai realisasi dana desa dalam model ini merujuk kepada penelitian Sigit & Kosasih (2020) dan Otheliansyah & Yasni (2021).

3) Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan (konstan), sehingga pengaruh variabel bebas pada variabel terikat tidak dipengaruhi oleh selain variabel yang diteliti (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini, penggunaan variabel kontrol merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Otheliansyah & Yasni (2021). Terdapat beberapa variabel kontrol yang digunakan untuk pada penelitian ini, yaitu:

a. Laju inflasi (INF)

Laju inflasi (INF) adalah persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga secara umum dan dinyatakan dalam persentase. Penggunaan variabel kontrol inflasi pada penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Otheliansyah & Yasni (2021).

b. Indeks pembangunan manusia (IPM)

IPM mendeskripsikan bagaimana penduduk suatu daerah dapat mengakses hasil pembangunan berupa kemudahan dalam memperoleh penghasilan dan kemudahan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. IPM didasarkan pada tiga dimensi yakni pengetahuan, standar hidup layak, umur panjang dan hidup sehat. Angka IPM diukur berdasarkan angka 0 s.d. 100. Penggunaan variabel kontrol IPM pada penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Otheliansyah & Yasni (2021).

c. Jumlah Penduduk (POP)

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data yang digunakan adalah proyeksi penduduk dari 122 kabupaten daerah tertinggal setiap tahunnya. Pengukuran jumlah penduduk dalam satuan jiwa. Penggunaan variabel kontrol jumlah penduduk pada penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Otheliansyah & Yasni (2021).

Model Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan tiga variabel bebas (independen) dan dua variabel terikat sehingga model regresi yang digunakan merupakan regresi linear ganda. Adapun model penelitian yang dilakukan penulis dikembangkan dari peneliti



sebelumnya, Otheliansyah & Yasni (2021), dan Sulaeman & Silvia (2019) kemudian dirumuskan kembali dengan beberapa perubahan sebagai berikut:

Persamaan Model:

$$\text{Model 1 } TMT_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAKF_{it} + \beta_3 DD_{it} + \beta_4 INF_{it} + \beta_5 IPM_{it} + \beta_6 POP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TMT = Jumlah penduduk miskin (Dalam jiwa)

PAD = Jumlah Realisasi PAD (Dalam miliar rupiah)

DAKF = Jumlah Realisasi DAK Fisik (Dalam miliar rupiah)

DD = Jumlah Realisasi Dana Desa(Dalam miliar rupiah)

INF = Tingkat Inflasi (Dalam persen)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

POP = Jumlah Penduduk (Dalam jiwa)

$$\text{Model 2 } PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAKF_{it} + \beta_3 DD_{it} + \beta_4 INF_{it} + \beta_5 IPM_{it} + \beta_6 POP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Dalam miliar rupiah)

PAD = Jumlah Realisasi PAD (Dalam miliar rupiah)

DAKF = Jumlah Realisasi DAK Fisik (Dalam miliar rupiah)

DD = Jumlah Realisasi Dana Desa(Dalam miliar rupiah)

INF = Tingkat Inflasi (Dalam persen)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

POP = Jumlah Penduduk (Dalam jiwa)

Pemilihan model 1 dan 2 tersebut diambil dari penelitian Otheliansyah & Yasni (2021), dengan beberapa perubahan seperti penambahan variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik baik di tingkat pusat maupun daerah, berupa produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, jumlah penduduk miskin, tingkat inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah penduduk (POP) untuk masing-masing daerah tertinggal. Kemudian data reaisasi pendapatan asli daerah periode 2015 s.d. 2019 bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, serta dana alokasi khusus fisik dan dana desa periode 2015 s.d. 2019 bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, serta dana alokasi khusus fisik dan dana desa periode 2015 s.d. 2019 bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Periode 2015 s.d. 2019 diambil dengan beberapa pertimbangan, antara lain: periode efektif pemerintahan pada masa presiden Joko Widodo yaitu periode 2015-2019, sesuai dengan RPJMN 2015-2019 serta merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Periode 2015-2019. Penetapan daerah tertinggal disusun berdasarkan beberapa indikator antara lain: perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Peneliti memilih kemiskinan dan PDRB dengan merujuk kepada kriteria pertama dalam menetapkan daerah tertinggal yaitu indikator perekonomian. Indikator perekonomian terdiri atas kemiskinan dan PDRB (Bappenas, 2016).

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Berikut ini parameter yang digunakan untuk memilih sampel yang akan digunakan dalam penelitian:

1. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2015-2019 dan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015, terdapat 122 daerah kabupaten yang statusnya ditetapkan sebagai daerah tertinggal.



2. Dari 122 kabupaten tersebut telah melaporkan realisasi APBD periode 2015 s.d. 2019 ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
3. Pada 122 kabupaten tersebut telah dipublikasikan data statistik keuangan daerah periode 2015 s.d. 2019 pada Badan Pusat Statistik baik dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Tabel 2. Hasil Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal Periode 2015-2019	122
2.	Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal yang Datanya Tidak Lengkap	(0)
	Jumlah sampel yang digunakan	122
3.	Tahun Penelitian 2015 s.d. 2019 (periode)	5
4.	Jumlah sampel penelitian (sampel-periode)	610

Sumber: data diolah (2021)

Analisis Deskripsi Statistik

Tahap selanjutnya sebelum melakukan pengujian terhadap model penelitian adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum atas data yang diperoleh sehingga dapat tergambaran bagaimana sebaran data yang diperoleh serta memberikan pemahaman atas karakteristik data yang diperoleh namun tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan terhadap data yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2016). Analisis statistik deskriptif diterapkan untuk semua variabel penelitian.

Analisis statistik deskriptif yang dilakukan pada penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yang pertama analisis pemusatan data yaitu ukuran pemusatan yang akan dianalisis antara lain mean (nilai rata-rata) dan median (nilai tengah). *Mean* memberikan gambaran terhadap nilai rata-rata untuk setiap variabel yang diobservasi. Median memberikan gambaran atas nilai data yang ada di tengah-tengah pada saat data diurutkan nilainya (Mulyono, 2006) dan yang kedua analisis penyebaran data menggunakan nilai minimum (nilai terendah), nilai maximum (nilai tertinggi), dan standar deviasi (simpangan baku). Nilai minimum dan maximum menggambarkan nilai ekstrim baik yang paling rendah maupun yang paling tinggi dari data yang diobservasi. Standar deviasi merupakan ukuran dispersi yang menunjukkan indeks sebaran atau variabilitas dalam data (Sekaran & Bougie, 2016).

Pada Tabel 3 berikut menyajikan ringkasan hasil analisis statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3. Analisis Deskripsi Statistik

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
TMT	42.067,49	30.380,00	240.350,00	2.830,00	39.346,59
PDRB	4.499,00	2.620,50	25.420,00	120,00	4.722,71
PAD	66,05	45,47	467,47	1,27	64,98
DAKF	141,93	135,02	322,95	6,40	52,54
DD	108,89	91,57	419,51	8,72	72,77
INF	3,13%	2,91%	9,41%	-0,65%	1,95%
IPM	61,26	62,99	72,57	25,47	6,77
POP	234.928,7	153.891	1.302.608	13.615	243.395,1

Sumber: Data diolah (2021)

Hasil Pemilihan Model Panel dan Uji Asumsi Klasik

Setelah melakukan uji asumsi klasik terhadap model 1 dan model 2 pada penelitian ini tidak lolos dalam uji heteroskedastisitas sehingga dilakukan perubahan terhadap model dengan melakukan estimasi *General Least Square* (GLS). Namun demikian, setelah dilakukan regresi dengan *fixed effect model* (FEM) dengan estimasi GLS muncul dugaan dari regresi yang dilakukan memberikan hasil yang bias (*spurious regression*). Hal ini dapat dilihat dari nilai *R*-



squared dan *Adjusted R-squared* baik dari model 1 maupun model 2 memiliki nilai yang hampir mendekati angka 1. Tingginya nilai *R-squared* dan *Adjusted R-squared* disebabkan ketika menggunakan *fixed effect model* (FEM) memperhitungkan daerah-daerah pada penelitian ini sebagai variabel *dummy* meskipun variabel bebas yang ada dalam penelitian ini hanya tiga, FEM melakukan estimasi terhadap banyak variabel. FEM menghubungkan variabel-variabel yang tidak diobservasi dengan variabel terikat (William, 2012).

Clark & Linzer (2012) dalam Bell and Jones (2015) menyebutkan bahwa dalam pemilihan model regresi data panel tidak mutlak dilihat dari hasil uji hausman sebagai dasar pemilihan. Dalam pengujian informal, jika dalam penelitian memiliki jumlah cross section (n) lebih besar time series (t), maka penggunaan *random effect model* (REM) lebih efisien daripada *fixed effect model* (FEM) (Gujarati & Porter, 2015). REM dan FEM memiliki kemampuan yang sama baiknya dalam melakukan estimasi, namun REM mampu melakukan estimasi lebih tepat (Hofmann & Werkheiser, 2017). Hal ini karena *standard error* yang ada pada REM lebih kecil sehingga hasil estimasi lebih representatif. REM mampu melakukan seluruh estimasi yang dilakukan FEM (Bell & Jones, 2015).

Merujuk kepada hasil R-squared pada kedua model yang memiliki dugaan bias dengan nilai *R-square* 0,99, jumlah *cross section* (n) bernilai 122 lebih besar dari jumlah *time series* (t) bernilai 5, maka penulis mengambil kesimpulan untuk menggunakan *random effect model* (REM) dalam melakukan regresi terhadap model 1 dan model 2. Sehubungan dengan pemilihan model REM yang telah menggunakan estimasi *General Least Square* (GLS), maka uji asumsi klasik dilakukan adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas terhadap model 1 dan model 2 (Gujarati & Porter, 2015)

Dalam uji normalitas dengan melihat hasil uji *Jarque-Bera* untuk model 1 dan model 2 menunjukkan angka probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05 sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi. Meskipun asumsi normalitas untuk kedua model tidak terpenuhi, karena pada penelitian ini memiliki jumlah observasi 610 maka sesuai dengan teorema limit pusat (*Central Limit Theorem/CLT*) yang menyebutkan apabila sampel > 30 yang berarti memiliki sampel besar akan mengikuti distribusi normal. Selain itu, analisis data panel yang memiliki observasi lebih dari 100 dapat dikatakan memenuhi normalitas data, sehingga uji normalitas dapat diabaikan karena distribusi error term telah mendekati normal (Gujarati & Porter, 2015).

Selanjutnya, sesuai hasil perhitungan model matrix correlation pada kedua model penelitian (model 1 dan 2) memperlihatkan tidak ada nilai yang melebihi 0,90 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kedua model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadi korelasi linier antar variabel bebas. Jika terdapat korelasi antar variabel bebas yang memiliki nilai $\geq 0,90$, maka dapat diduga terjadi masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Hasil Pengujian Hipotesis Model 1 (Model Kemiskinan)

Dugaan awal dalam model kemiskinan adalah variabel terikat kemiskinan (TMT) dipengaruhi oleh variabel bebas pendapatan asli daerah (JRPAD), dana alokasi khusus fisik (JRDAKF), dan dana desa (JRDD) dengan menggunakan variabel kontrol inflasi (INF), indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah penduduk (POP). Hasil regresi dapat kita lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Model 1

<i>Dependant Variabel : Kemiskinan</i>			
<i>Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)</i>			
<i>Variabel</i>	<i>Coeficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Probability</i>
C	51390.16	6.108485	0.0000
JRPAD	-2.922126	-0.559101	0.5763



JRDAKF	-2.281684	-0.850707	0.3953
JRDD	-25.93145	-6.892953	0.0000
INF	-20714.45	-3.260915	0.0012
IPM	-574.0687	-4.083313	0.0001
POP	0.126984	18.16948	0.0000
R-squared	0.353350	F-statistic	54.91642
Adjusted R-squared	0.346916	Prob. (F-statistic)	0.0000

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 4 menunjukkan nilai *R-squared* 0.353350. Hal ini menggambarkan bahwa sebanyak 35.33% variasi dalam variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAK Fisik dan Dana Desa serta inflasi, IPM dan POP sebagai variabel kontrol. Sementara sisanya senilai 64.67% dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian. Nilai dari *prob. F-statistic* sebesar 0.0000, berada dibawah dari nilai α 0,05, maka peneliti mengambil kesimpulan untuk model 1 menghasilkan variabel-variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan pengujian *t-statistic*, penelitian ini memperlihatkan bahwa hanya variabel utama berupa dana desa yang memiliki pengaruh negatif signifikan (H_3 diterima). Adapun variabel PAD dan DAK Khusus masing-masing tidak terbukti berdampak signifikan (H_1 dan H_2 ditolak) karena nilai *prob* $> 0,05$. Di sisi lain, masing-masing variabel kontrol (tingkat inflasi, IPM, dan jumlah penduduk), memiliki nilai *prob.* $< \alpha 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Hal ini menguatkan penggunaan variabel kontrol sebagai variabel pendukung dalam studi terdahulu yang ikut memberikan pengaruh terhadap variabel terikat.

Hasil Pengujian Hipotesis Model 2 (Model PDRB)

Dugaan awal dalam model pertumbuhan ekonomi adalah variabel terikat PDRB dipengaruhi oleh variabel bebas pendapatan asli daerah (JRPAD), dana alokasi khusus fisik (JRDAKF), dan dana desa (JRDD) dengan menggunakan variabel kontrol inflasi (INF), indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah penduduk (POP). Hasil regresi dapat kita lihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Model 2

<i>Dependant Variabel : PDRB</i>			
<i>Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)</i>			
<i>Variabel</i>	<i>Coeficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Probability</i>
C	-5244055	-3.185261	0.0015
JRPAD	2.831765	2.359988	0.0186
JRDAKF	0.406284	0.658178	0.5107
JRDD	3.258279	4.081129	0.0001
INF	2705.934	1.850753	0.0647
IPM	98.36358	3.559978	0.0004
POP	0.012912	11.29946	0.0000
R-squared	0.351550	F-statistic	54.48490
Adjusted R-squared	0.345097	Prob. (F-statistic)	0.0000

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 5 menunjukkan nilai R-squared 0.351550. Hal ini menggambarkan bahwa sebanyak 35.16% variasi dalam variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAK Fisik dan Dana Desa serta inflasi, IPM dan POP sebagai variabel kontrol. Sementara sisanya senilai 64.84% dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian. Nilai dari *prob. F-statistic* sebesar 0.0000, berada dibawah dari nilai α 0,05, maka peneliti mengambil



kesimpulan untuk model 1 menghasilkan variabel-variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan pengujian t-statistic, penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel utama berupa PAD dan dana desa masing-masing memiliki pengaruh positif signifikan (H_4 dan H_6 diterima) terhadap PDRB. Adapun variabel DAK Khusus tidak terbukti berdampak signifikan (H_5 ditolak) karena nilai prob. $> 0,05$. Di sisi lain, variabel control berupa IPM dan jumlah penduduk, memiliki nilai prob. $< \alpha$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dua variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Adapun variabel control berupa Tingkat inflasi tidak terbukti berdampak terhadap PDRB.

Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Kemiskinan Daerah Tertinggal

Hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini menduga bahwa PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah tertinggal. Dengan melihat pada Tabel 4 hasil uji regresi model 1 kemiskinan menunjukkan nilai koefisien variable PAD sebesar -2.922126. Sementara nilai probability variabel PAD sebesar 0.5763 lebih besar dari α yaitu 0.05. Berangkat dari hasil nilai probability dan koefisien variabel PAD dapat disimpulkan secara individu PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di daerah tertinggal.

Tidak signifikannya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan menunjukkan adanya indikasi belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilakukan. Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah tahun 2019 secara keseluruhan untuk daerah tertinggal memiliki nilai Rp155.390.185.718.774. Dari total pendapatan daerah ini, bagian pendapatan asli daerah senilai 5,93% sedangkan porsi terbesar pendapatan daerah ada di dana perimbangan sebesar 72,66% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 21,41%. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) adalah jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010). Peneliti melihat perbandingan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah membuktikan bahwa kemampuan daerah tertinggal dalam menjalankan desentralisasi fiskal masih rendah. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah, dengan fakta derajat otonomi fiskal yang memiliki nilai 5,93% pengaruh pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja program dan kegiatan untuk pengentasan kemiskinan rendah. Rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah menyebabkan pemerintah daerah masih terus bergantung pada alokasi dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk membiayai program dan kegiatan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2016) yang menyatakan bahwa PAD secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado. Frans et al. (2017) dalam penelitiannya tidak berhasil menemukan bukti yang menyatakan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, hasil temuan ini berbeda dengan Abrar et al. (2020) yang menyatakan bahwa PAD memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan setelah periode penetapan daerah otonomi khusus Provinsi Aceh. Najmi (2019) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Semakin tinggi nilai PAD akan memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan oleh tingkat kontribusi dari pendapatan asli daerah yang ada di luar sampel daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dari tingkat pengelolaan pendapatan asli daerah yang ada di Indonesia. Merujuk kepada teori fiscal federalism membuktikan daerah yang berhasil dalam mengelola pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah



sehingga memiliki derajat otonomi fiskal yang baik mampu mengurangi kemiskinan yang terjadi

Pengaruh DAK Khusus terhadap Kemiskinan Daerah Tertinggal

Kebijakan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa yang dijalankan pemerintah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik (Kementerian Keuangan, 2018). Dalam rangka mencapai tujuan utama ini tercermin dari besaran dana alokasi khusus fisik yang telah disalurkan ke pemerintah daerah selama periode 2015 s.d. 2019. Berdasarkan data analisis statistik deskriptif pada Tabel IV.11 dari nilai rata-rata menggambarkan adanya penurunan penyaluran dana alokasi khusus fisik pada tahun 2017, 2018 dan naik kembali pada tahun 2019.

Hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini menduga bahwa dana alokasi khusus fisik memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Dari hasil regresi data panel menunjukkan nilai koefisien variabel DAK Fisik sebesar -2.922126, dengan tingkat signifikansi parsial dari probability 0,3953 lebih besar dari nilai α yaitu 0.05. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil ini adalah variabel DAK Fisik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus fisik bersifat *specific purpose grant* yang dalam penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam bentuk pemberiannya DAK Fisik terbagi menjadi dua yaitu DAK Fisik regular dan DAK Fisik penugasan. DAK Fisik regular memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. DAK Fisik penugasan bertujuan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. Penggunaan DAK Fisik dalam rangka pemerataan terhadap kesenjangan infrastruktur sarana dan prasarana antar daerah. Dampak yang diterima secara langsung kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana publik (DAK Fisik) serta dukungan operasional pelayanan publik (DAK Nonfisik).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasu et al. (2019) yang menemukan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado. Salah satu penyebab tidak signifikan pengaruh dana alokasi khusus adalah adanya keterlambatan dalam penerimaan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK dari Kementerian Teknis terkait serta munculnya perubahan alokasi DAK Fisik yang berdampak pada penyesuaian perencanaan dan penganggaran dana pendukung, dana penunjang atau biaya umum dan dana lainnya, kemudian waktu proses pelaksanaan lelang yang cukup lama sehingga hal ini berpengaruh terhadap target dan capaian realisasi penyerapanan dana per triwulan pada tahun anggaran berjalan (Prayona et al., 2019).

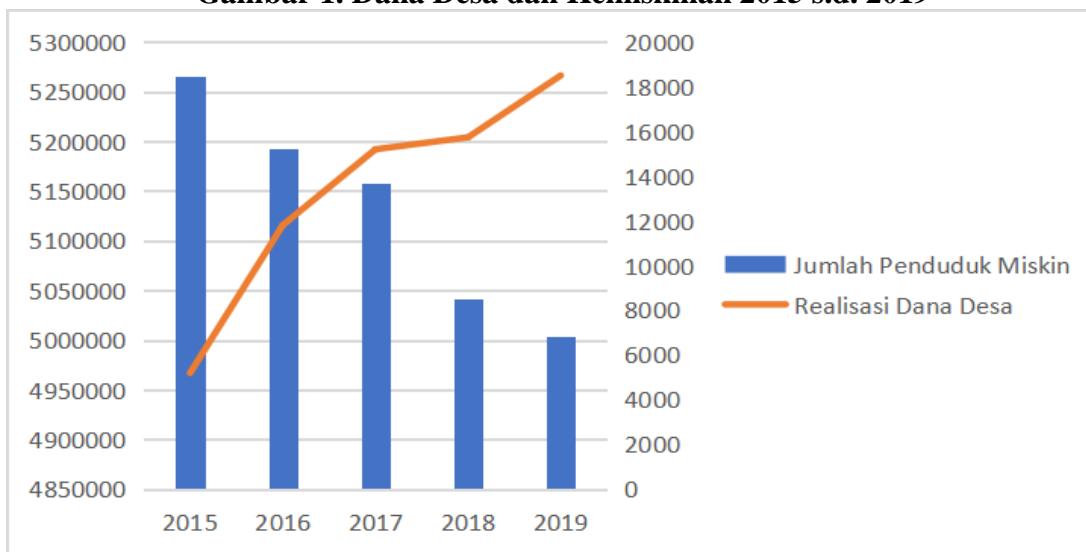
Namun penelitian ini berbeda dengan Paulus et al. (2016) dan Samsul & Adiwidjaya (2020) menyatakan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat kemiskinan. Perbedaan ini terjadi akibat dari penggunaan time lag dua tahun, data desentralisasi fiskal tahun 2013 s.d. 2015 diregresikan dengan data kemiskinan tahun 2015 s.d. 2017. Salah satu data desentralisasi fiskal yang digunakan adalah dana alokasi khusus. Hasil dari pengujian ini menunjukkan dana alokasi khusus fisik memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan sebesar 0,137%. Qomariyah et al. (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dana alokasi khusus bidang infrastruktur memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan, dengan realisasi DAK bidang infrastruktur dapat menyerap tenaga kerja serta peningkatan upah yang akhirnya berdampak pada pengurangan kemiskinan.



Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan Daerah Tertinggal

Hipotesis ketiga (H_3) pada penelitian ini adalah dana desa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan data hasil regresi menunjukkan nilai koefisien dana desa sebesar -25.93145 dengan tingkat probability $0.00 < \text{nilai } \alpha < 0.05$ yang artinya variabel dana desa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Penyaluran dana desa berdampak pada penurunan kemiskinan yang terjadi di daerah tertinggal. Seiring dengan bertambahnya realisasi penyaluran dana desa berdampak pada penurunan jumlah masyarakat miskin yang ada di daerah tertinggal. Sebagaimana Gambar IV.1 menunjukkan adanya tren penurunan jumlah penduduk miskin yang disertai dengan peningkatan jumlah penyaluran dana desa di daerah tertinggal.

Gambar 1. Dana Desa dan Kemiskinan 2015 s.d. 2019

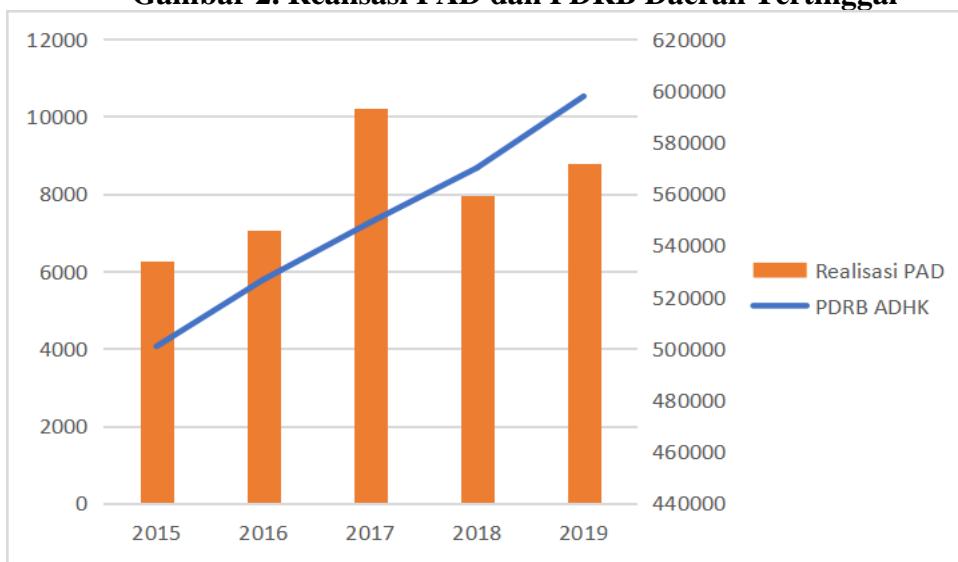


Sumber: Diolah dari BPS dan DJPB (2021)

Hasil temuan ini sejalan dengan Otheliansyah & Yasni (2021) menemukan bukti bahwa dana desa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia. Sigit & Kosasih (2019) menemukan bahwa dana desa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Lebih lanjut hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (2017) melakukan kajian terkait manfaat dana desa dalam percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa. Dengan mulai diimplementasikannya dana desa pada tahun 2015, tingkat kemiskinan perdesaan menurun dari 14,2 persen (tahun 2015) menjadi 13,9 persen (tahun 2017). Jumlah penduduk miskin perdesaan turun dari 17,94 juta jiwa (tahun 2015) menjadi 17,10 juta jiwa (tahun 2017). Sementara itu, gini ratio perdesaan pada tahun 2015 sebesar 0,334 dan turun menjadi 0,320 di tahun 2017. Hal ini mengindikasikan program/kegiatan pemerintah salah satunya dana desa dapat memberikan manfaat positif dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di tingkat desa

Pengaruh PAD terhadap PDRB Daerah Tertinggal

Hipotesis keempat (H_4) pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB daerah tertinggal. Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan variabel PAD memiliki nilai probability 0.0186 lebih kecil dari nilai α yaitu 0.05 dan nilai koefisien sebesar 2.831765 . Hasil ini memperlihatkan pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif. Setyawati (2007) menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan PAD yang diterima daerah, maka PDRB ikut meningkat. Salah satu penyebabnya adalah pajak dan retribusi daerah yang dipungut daerah dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk belanja pemerintah.

**Gambar 2. Realisasi PAD dan PDRB Daerah Tertinggal**

Sumber : Diolah dari BPS dan DJPK (2021)

Gambar 2 menunjukkan realisasi PAD dengan PDRB ADHK daerah tertinggal. Peningkatan nilai PAD dari tahun ke tahun merupakan sebuah gambaran bahwa daerah mampu mengembangkan perekonomian regional di daerahnya. Komponen yang membentuk PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD akan digunakan dalam rangka menjalankan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan PDRB di daerah. Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah salah satu pembentuk pendapatan nasional adalah intervensi pemerintah dalam bentuk belanja. Peningkatan PAD akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga penyusunan anggaran belanja yang dilakukan membawa dampak yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan daerah dalam peningkatan PDRB.

Sejalan dengan penelitian Putri (2015) menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Tingginya nilai PAD suatu daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut mampu mengelola potensi daerah yang dimiliki

Pengaruh DAK Khusus terhadap PDRB Daerah Tertinggal

Dugaan awal pada penelitian ini adalah (H_5) DAK Fisik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB daerah tertinggal. Namun, berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 5 variabel DAK Fisik memiliki nilai probability 0.5107 lebih besar dari α yaitu 0.05 sehingga H_0 diterima yang artinya variabel DAK Fisik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB daerah tertinggal.

Merujuk kepada data perbandingan realisasi pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik untuk daerah tertinggal periode 2015-2019 sebagaimana tersaji pada Tabel 6 dapat kita cermati tren perkembangan penerimaan daerah. Persentase kontribusi dari dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah masih sangat tinggi, lebih dari 50% pendapatan daerah bersumber dari dana alokasi umum. Dana alokasi khusus fisik periode 2015-2019 menyumbang porsi sekitar 11-14% dari total pendapatan daerah, kontribusi DAK Fisik terhadap pendapatan daerah cukup tinggi, berada di posisi kedua setelah dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan ketergantungan daerah tertinggal terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi

Tabel 6. Perbandingan PAD, DBH, DAU dan DAK Fisik dengan Pendapatan Daerah

Variabel Penelitian	2015	2016	2017	2018	2019
---------------------	------	------	------	------	------



Pendapatan Asli Daerah	5,19%	5,13%	7,14%	5,50%	5,93%
Dana Bagi Hasil	5,40%	5,50%	4,09%	5,13%	4,61%
Dana Alokasi Umum	57,18%	54,69%	53%	52,09%	49,86%
DAK Fisik	13,37%	14,67%	11,91%	11,17%	12,03%

Sumber : Diolah dari DJPK (2021)

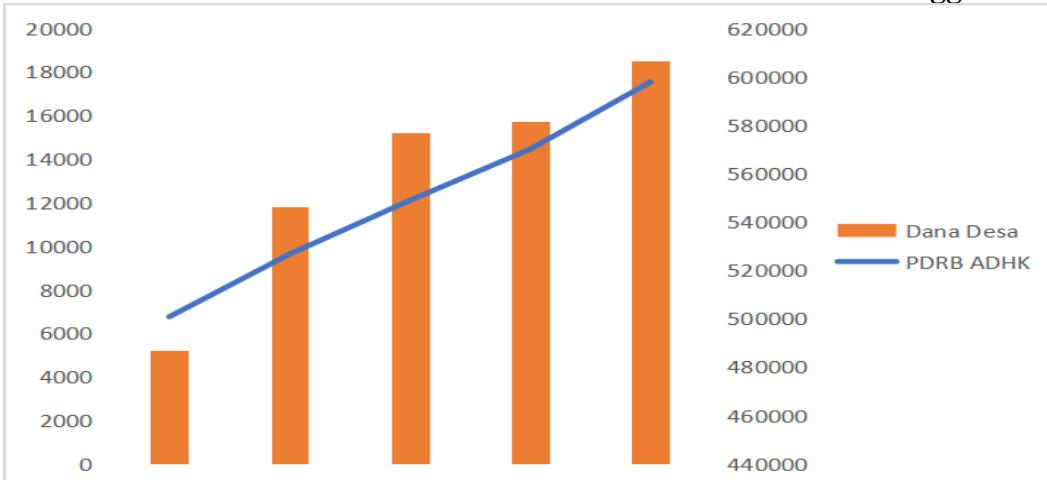
Temuan ini sejalan dengan Sulaeman dan Silvia (2019) menemukan bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana definisi Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus diantaranya bidang pendidikan, bidang jalan, bidang irigasi, bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang sanitasi. Tidak berpengaruhnya penyaluran DAK Fisik disebabkan pada proses penyaluran DAK Fisik ditemukan kendala bagi daerah untuk menyelesaikan persyaratan yang diberikan dalam petunjuk teknis sehingga sebagian Dana Alokasi Khusus Fisik tidak tersalurkan. Kendala yang dihadapi salah satunya keterlambatan penyampaian laporan realisasi, menyampaikan laporan namun tidak lengkap dan tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan. Keterlambatan ini berdampak kepada pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan sehingga tujuan peningkatan PDRB daerah tertinggal belum dapat terpenuhi (DJPK, 2016).

Berbeda dengan hasil temuan pada penelitian ini, Mukiwihando (2020) melakukan penelitian pada salah satu bidang dana alokasi khusus yaitu bidang pertanian, dalam penelitiannya menemukan bahwa dana lokasi khusus bidang pertanian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bidang pertanian, setiap penambahan alokasi dkk bidang pertanian sebesar 1%, pertumbuhan PDB sektor pertanian meningkat sebesar 0,99%. Perbedaan ini disebabkan karena pengalokasian dana alokasi khusus fisik per bidang seperti bidang pendidikan, bidang jalan, bidang irigasi, bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang sanitasi tidak memiliki hubungan langsung terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi PDB secara keseluruhan.

Pengaruh Dana Desa terhadap PDRB Daerah Tertinggal

Hipotesis keenam (H_6) pada penelitian ini adalah adanya dugaan bahwa dana desa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap PDRB daerah tertinggal. Berdasarkan analisis regresi model 2 PDRB pada Tabel 5, variabel dana desa memiliki nilai probability $0.0000 < \alpha$ yaitu 0.05 dengan nilai koefisien 3.258279. Hasil ini menunjukkan bahwa dana desa memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap PDRB. Hipotesis keenam diterima.

Gambar 3. Realisasi Dana Desa dan PDRB Daerah Tertinggal



Sumber: Diolah dari BPS dan DJPB (2021)



Gambar 3 menunjukkan perkembangan realisasi dana desa dan PDRB ADHK selama tahun 2015 s.d. 2019. Data memperlihatkan seiring dengan peningkatan penyaluran dana desa, PDRB ADHK juga ikut mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan temuan Otheliansyah & Yasni (2021) menyatakan bahwa penyaluran dana desa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap PDRB daerah tertinggal. Dana desa yang dibelanjakan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Tangkumahat et al. (2017) dalam penelitiannya menunjukkan dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang berada di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Dana desa dalam pemanfaatannya digunakan secara swakelola, dengan mempekerjakan masyarakat desa untuk pelaksanaan program dan kegiatan desa. Sejalan dengan teori desentralisasi fiskal, dengan adanya penyaluran dana desa yang digunakan pemerintah desa untuk mendanai pengeluaran desa dalam upaya mewujudkan tujuan utama pembangunan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan analisis regresi terhadap 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia (periode 2015 s.d. 2019) dengan jumlah observasi sebanyak 610, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada daerah tertinggal adalah dana desa. Semakin tinggi dana desa disalurkan dan dimanfaatkan secara efektif, akan semakin besar pula penurunan angka kemiskinan di daerah tertinggal. Di sisi lain, variabel PAD dan dana desa memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal. DAK khusus tidak terbukti berpengaruh baik terhadap angka kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, faktor-faktor diluar model penelitian yang mempengaruhi kemiskinan dan PDRB belum dipertimbangkan, seperti dana alokasi khusus non fisik, dana alokasi umum, dana bagi hasil, SiLPA, kemandirian daerah, dan lain sebagainya. Kedua, Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif sehingga faktor lain yang menentukan tingkat kemiskinan dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari sisi kualitatif belum tersentuh peneliti. Ketiga, penelitian ini belum memperhitungkan pengaruh dari *lag variabel* dari penerimaan PAD, DAK Fisik dan Dana Desa serta dampaknya terhadap kemiskinan dan PDRB. Bisa saja manfaat dari DAK Fisik dan Dana Desa baru dapat diterima beberapa tahun setelah penyaluran. Keempat, jangka waktu pengamatan dilakukan 5 tahun yaitu mulai 2015 s.d. 2019. Hasil berbeda mungkin terjadi apabila menggunakan waktu pengamatan yang lebih lama.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah daerah tertinggal agar dapat meningkatkan kemandirian fiskal, salah satunya dengan cara mengoptimalkan penerimaan daerah dari sisi PAD, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi sehingga potensi daerah dapat dimaksimalkan. Kedua, perlu adanya evaluasi lebih lanjut berkaitan penyaluran DAK Fisik yang belum berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, perlu adanya sinergi terhadap seluruh unit yang memiliki peran terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa hingga unit terkecil di pemerintah desa, sehingga koordinasi dan tujuan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan serta memiliki dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di daerah tertinggal. Keempat, pemerintah daerah tertinggal diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa di daerah tertinggal



Penelitian lanjutan diperlukan untuk melihat potensi dan tantangan pada masing-masing bidang DAK Fisik dengan memperluas objek yang diteliti serta penggunaan data yang lebih lengkap. Disamping itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian kualitatif atau campuran sehingga analisis mengenai kemiskinan dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang didapatkan lebih komprehensif. Dikarenakan adanya dugaan *lag time* munculnya pengaruh variabel bebas terhadap terhadap kemiskinan dan PDRB, studi lanjutan dapat mempertimbangkan penggunaan lag time agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M., Juanda, B., Firdaus, M., Dedi, & Hakim, B. (2020). The Impact of Special Autonomy Funds on Poverty of Human Development and Unemployment in Aceh. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. [www.ijicc.net Volume 12, Issue 10, 2020](http://www.ijicc.net/index.php/volume-12-2020/176-vol-12-iss-10) <https://www.ijicc.net/index.php/volume-12-2020/176-vol-12-iss-10>
- Abimanyu, Anggitto dan Megantara, Andie. (2009). Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Jakarta: Kompas.
- Afrilianto, A.G. (2017). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bogor. Jurnal: Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/89432>
- Akai, N. dan Sakata, M. (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth. Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*. LII:93-108.
- Aladejare, S. A. (2013). Government Spending and Economic Growth: Evidence from Nigeria. In Munich Personal RePEc Archive (Vol. 4, Issue 43916). <http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/43916.html>
- Allen, Richard, Richard Hemming, dan Barry H. Potter. (2013). *The International Handbook of Public Financial Management*. New York: Palgrave Mcmillan.
- Alvaro, Rendy & Zahara, Ervita Luluk. (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Budget* Vol 4 No. 2 2019 <https://puskajianggaran.dpr.go.id/produk/index-jurnal-budget/page/5>
- Amalia Ulva, Nurul. (2015). Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur. [https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70883](http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70883)
- Anwar, M. L. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Kota Manado tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/12377>.
- Arham, M. A., dan Hatu, R. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 7(10), 433-442
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2), 149–167. <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Bahl, Roy. (1999). *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*. Georgia: Georgia State University.
- Bell, A., & Jones, K. (2015). Explaining Fixed Effects: Random Effects Modeling of Time-Series Cross-Sectional and Panel Data. *Political Science Research and Methods*, 3(1), 133–153.



- Boediono. (2018). Teori Pertumbuhan Ekonomi (Edisi Pertama Cetakan Kesembilan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomikan & Bisnis UGM
- Frans, D., Rahayu, S., & Mahardika, D. P. K. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan (studi Empiris Pada Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015). *eProceedings of Management*, 4(2).
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics (Fourth). New York: Mc Graw Hill.
- Gujarati, D.N., & Porter, D. C. (2015). Dasar-dasar ekonometrika: Buku 2 (edisi ke-5). Jakarta: Salemba Empat.
- Hofmann, J., & Werkheiser, C. (2017). Efficiency of Fixed and Random Effects Estimators: A Monte Carlo Analysis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Hia, V., Handaka, R., & Zega, Y. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 75 - 84. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.218>
- Ibrahim, F. N. A., & Abdul, I. (2019). Effect of Special Allocation Funds (DAK), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.2000>
- Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is Pro- poor Growth?. *Asian Development Review* 18 (1): 1–16.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2016). *Laporan Akhir Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan ahun 2014 dan Perpres No. 131 Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian PPN
- Kementerian Keuangan. (2017). Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>
- Koto, Julianis (2016). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economic and Economic Education* Vol, 4(2), 192-209. <https://doi.org/10.22202/economica.2016.v4.i2.633>
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49(1), 1–21. <https://doi.org/10.1086/452488>
- Mahmudi, (2010). Menejemen kinerja sektor publik (edisi 2). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mankiw, N.G., Romer, D., & Weil, D.N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407-437.
- Martinez-Vazquez dan McNab. (2001). *Fiscal Decentralization: Issues in Theory and Challenges in Practice*. Georgia: Georgia State University.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol 5, No. 2, Desember 2012
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2302, 0164.



- Mukiwiando, R. (2020). Dampak Kebijakan Dana Alokasi Khusus Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(1), 72-80. <https://doi.org/10.31092/jmfp.v4i1.805>
- Musgrave and Musgrave. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. 5th ed. New York: Mc-Graw Hill.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2008). *Ekonometrika: Pendekatan Populer dan Praktis Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Najmi, I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana ZIS terhadap Kemiskinan: Bukti Empiris Data Panel di Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* Vol, 3(1).
- Nurhemi, N., & Suryani, G. (2015). Dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(2), 183-20 <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i2.522>
- Nuryadin, D., & Suharsih, S. (2017). Analisis dan evaluasi dampak dana alokasi khusus terhadap indikator kinerja pembangunan di daerah studi kasus kabupaten-kota 2003-2013. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 62-70. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3954>
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National tax journal*, 46(2), 237-243.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. In *Journal of Economic Literature* (Vol. 37, Issue 3). <http://www.jstor.org/stable/2564874?origin=JSTOR-pdf>
- Oates, W. E. (2006). On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. In *IFIR Working Paper Series* (No. 2006-05). <https://martin.uky.edu/sites/martin.uky.edu/files/IFIR/IFIR-Pub/ifir-wp-2006-05.pdf>
- Otheliansyah, G., & Yasni, R. (2021). Pengaruh Penyaluran Dana Desa pada Indikator Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 57-74.
- Paat, D. C., Koleangan, R. A., & Rumate, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(1).
- Paulus, Dewi, I.S., Rosalina A.M. Koleangan, dan Daisy S.M. Engka. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19, No. 2.
- Prayona, G. H., Wisnumurti, A. A. G. O., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 57-70.
- Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Uumum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. (2021). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinandi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4), 12-25.
- Rosen, Harvey and Ted Gayer, (2010), *Public Finance*, 9th ed., McGraw-Hill.
- Rosoiu, Iulia. (2015). The Impact Of Government Revenues And Expenditure On the Economic Growth. *Procedia Economics and Finance*. 32



- Qomariyah, N., Suharno, S., & Priyarno, D. S. (2017). Dampak Transfer Fiskal (Conditional Grant) Terhadap Pembangunan Pertanian, Kemiskinan Dan Ketimpangan Di Indonesia: Analisis Data Panel. *Agriekonomika*, 6(2), 164-173.
- Samsul, K., & Adiwidjaja, I. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Melalui Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 9(1), 62-67.
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(01), 34-49.
- Schiavo-Campo, S. (2017). Government Budgeting and Expenditure Management. In *Government Budgeting and Expenditure Management*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315645872>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Method for Business* (Seventh Edition). West Sussex: Wiley.
- Setyawati, Anis, dan Hamzah, Ardi. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol 4. No.2.
- Sidik, M. (2002). Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal. In *Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Syamsul, S. (2020). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan di indonesia. *AKUNTABEL*, 17(1), 140-147.
- Sukirno, Sadono. (2011). *Teori Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97 - 112. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65–89. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi* 13 (2A): 335-342.
- Widianto, A., Sedyautami, E. U., & Nurmansyah, A. L. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Monex: Journal of Accounting Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal*, 5(2).
- Williams, R. (2012). Panel Data 4: Fixed Effects vs Random Effects Models. *Sociology* 73994, 1–6.
- Woyanti, Nenik. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMP terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Pra dan Pasca Desentralisasi Fiskal. *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 28, No. 2.
- Zhang, T., & Zou, H. F. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of public economics*, 67(2), 221-240. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(97\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00057-1).